

ANALISIS YURIDIS MALPRAKTEK DOKTER AKIBAT KELALAIAN DALAM MENANGANI PASIEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)

ABSTRAK

Fadhlan*

Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan alam hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter terhadap pasien akibat malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

Kesimpulan dari pembahasan adalah Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Tanggung jawab dokter terhadap pasien akibat malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Malpraktek, Kelalaian

**JURIDICAL ANALYSIS OF MALPRACTICE OF DOCTORS DUE TO
NEGLIGENCE IN HANDLING PATIENTS VIEWED FROM
HEALTH LEGAL PERSPECTIVE**
*(Study of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia
Number 2033 K/Pid.Sus/2017*

ABSTRACT

Fadhlan *

Doctors and health workers who carry out health service activities must have a license to practice from the government in accordance with applicable regulations, in carrying out health services must be in accordance with medical competence. The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements regarding medical malpractice in treating patients are viewed from the perspective of health law, how are the responsibilities of doctors in treating patients viewed from the perspective of natural health law in health law, what are the responsibilities of doctors towards patients due to medical malpractice in treating patients according to health law.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials

The legal arrangements for medical malpractice in treating patients from a health law perspective are regulated in Article 78 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice that every person deliberately uses tools, methods or other means of providing services to the public which gives the impression that if the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or a dentist's registration certificate or a practice permit.

The conclusion from the discussion is that the responsibility of doctors in treating patients from a health law perspective is included in the category of criminal malpractice, when the act fulfills the formulation of a criminal offense. The responsibility of doctors to patients due to medical malpractice in treating patients according to health law in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 2033 K /Pid.Sus/2017 is based on the consideration that the defendant did not find unlawful and unlawful acts which must be judged by intention or unlawful intention of an act on the part of the perpetrator so that the element deliberately uses tools, methods or other means provide services to the public that gives the impression that the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or dentist's registration certificate or a license to practice.

Keywords: Crime, Malpractice, Negligence